

**PENGARUH PERAN INTERNAL AUDIT DAN DEWAN  
KOMISARIS TERHADAP PENCEGAHAN  
KECURANGAN (*FRAUD*)**

**(Studi Kasus Pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang)**

**TESIS**

**Oleh**

**Nama : FRIERITA PANE**

**NPM : 1620050018**

**Konsentrasi : PEMERIKSAAN AKUNTANSI**



**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PENGESAHAN**

**PENGARUH PERAN INTERNAL AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS  
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)**

**(Studi Kasus Pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang)**

**FRIERITA PANE**  
**1620050018**

**KONSENTRASI : PEMERIKSAAN KEUANGAN**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang  
Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)

Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Maret 2018

Panitia Penguji

1. Dr. Murhasyah SE, M.Si 1. ....
2. Dr. Mayasari, S.E, AK, M.Si, CA 2. ....
3. Dr. Irfan S.E, M.M 3. ....
4. Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak, CA 4. ....
5. Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, QIA, Ak, CA CPAI 5. ....

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : FRIERITA PANE  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620050018  
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen  
Judul Tesis : PENGARUH PERAN INTERNAL AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Studi Kasus Pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 29 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Murhasyah SE, M.Si

Dr. Mayasari, S.E, AK, M.Si, CA

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 29 Maret 2018

Yang membuat pernyataan.

Frierita Pane  
NPM : 1620050018

# **PENGARUH PERAN INTERNAL AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)**

**(Studi Kasus Pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang)**

## **ABSTRAK**

**Frierita Pane  
1620050018**

Kecurangan telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Indikasi adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh internal audit dan dewan komisaris terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.

Penelitian dilakukan di PT. Pinang Witmas Sejati Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah general manager : 1 orang, manager : 1 orang, asisten kepala : 4 orang, asisten : 4 orang dan staf : 27 orang sehingga populasi berjumlah 37 orang dan sampel merupakan sampel jenuh sebanyak 37 responden. Data diperoleh melalui kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran internal audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, 2) dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, 3) peran internal audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

**Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan, Peran Internal Audit, Dewan Komisaris**

***THE INFLUENCE OF THE ROLE OF INTERNAL AUDIT AND THE BOARD OF COMMISSIONERS AGAINST THE PREVENTION OF FRAUD***

***(Case Study On PT Witmas Sejati Pinang Palembang)***

***ABSTRACT***

**Frierita Pane  
1620050018**

*Cheating has been getting a lot of media attention as the dynamics that often occur. Indication of cheating can be seen from the form of deliberate policies and actions that aim to commit fraud or manipulation to the detriment of the other party. The purpose of this research was to test and analyze the effect of internal audit and the Board of Commissioners against the prevention of fraud (fraud) at PT. Witmas Sejati Pinang Palembang.*

*Research done in the true Witmas Pinang PT Palembang. The population in this study was general manager: 1 people, managers: 1 people, Assistant Chief: 4 person, 4 person: Assistant and staff: 27 people so that the population of 37 people and the sample is saturated samples as many as 37 respondents. The data obtained through a questionnaire that has been done the test validity and reliability. Research using associative and quantitative approach. Data analysis in this study uses multiple regression test.*

*The results showed that 1) the role of internal audit have an effect on the prevention of cheating , 2) Board of Commissioners to the prevention of cheating, 3) the role of internal audit and the Board of Commissioners to the prevention of cheating.*

***Keywords: Prevention Of Cheating, The Role Of Internal Audit, The Board Of Commissioners***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah – Nya hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan tesis ini dengan judul “ **Pengaruh Peran Internal Audit Dan Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud* )**”. Pada **PT.Pinang Witmas Sejati di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir – Palembang.**

Penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Suami tercinta M.Sahbani, Amd meskipun terpisah jarak yang jauh (Medan – Palembang) namun tidak bosan-bosan selalu memberi semangat dan dukungan terhadap penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibunda Tercinta yang telah sangat banyak membantu, memberi semangat serta do'a maupun dukungan kepada penulis baik moril maupun materil dan juga kesediaan waktu dalam menjaga anak2 penulis selama kuliah dan juga membantu proses penyelesaian penyusunan tesis ini;
3. Anak-anakku tercinta kak.Lila dan Dek.Miranda dan Kakakku tersayang atas doa, semangat serta bantuan material dalam mendampingi penulis penyelesaian penyusunan tesis ini;

4. Bapak Dr. Agussani. MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Syaiful Bahri Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Dr. Widia Astuty, SE. M.Si, QIA. Ak. CA Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Ibu Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Bapak Dr. Muhyarsyah SE.M.Si Selaku Pembimbing I Penulis;
9. Ibu Dr. Maya Sari, SE, AK, M.Si, CA Selaku Pembimbing II Penulis;
10. Seluruh Staf Pengajar dan civitas akademik di Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
11. Sahabat terbaik Ira Cibro, Bang Saut Sitorus, Yuni, Dedi Syahputra, Nataysha, Aisyah, Ratih, Tridesi dan Ridho yang selalu membantu penulis dan semua sahabat-sahabat Prodi Akuntansi Angkatan X yang tak bisa disebutkan satu persatu I love U all to the moon and never comeback.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat amin.

Wassalam  
Medan, Maret 2018

**Frierita Pane**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	10
1. Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) .....	10
a. Pengertian Kecurangan .....	10
b. Penyebab Kecurangan .....	12
c. Pencegahan Kecurangan .....	14
d. Metode Pencegahan Kecurangan .....	15
e. Tujuan Pencegahan Kecurangan .....	18
f. Indikator Pencegahan Kecurangan .....	22
g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan .....	23
2. Peran Internal Audit .....	25
a. Pengertian Internal Audit .....	25
b. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal .....	26
c. Peran Internal Audit .....	27
d. Standar Profesi Audit Internal .....	33
3. Dewan Komisaris .....	35
a. Pengertian Dewan Komisaris .....	35
b. Prinsip Dewan Komisaris .....	35
c. Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	42
C. Kerangka Konseptual .....	42
D. Hipotesis Penelitian .....	44

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian .....	45
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
	C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
	1. Populasi .....	46
	2. Sampel.....	46
	D. Definisi Operasional Variabel.....	47
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
	1. Uji Validitas .....	49
	2. Uji Reliabilitas .....	52
	F. Teknik Analisa Data.....	54
	1. Statistik Deskriptif .....	54
	2. Analisis Regresi Berganda.....	54
	3. Uji Hipotesis .....	58
	4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	61
	1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	61
	2. Hasil Analisis Data.....	74
	a) Uji Asumsi Klasik .....	74
	b) Persamaan Regresi Berganda.....	78
	c) Hasil Uji Hipotesis .....	79
	d) Koefisien Determinasi.....	81
	B. Pembahasan.....	82
	1. Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan .....	82
	2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan .....	87
	3. Pengaruh Peran Internal Audit Dan Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	91
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	93

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Tahapan Penelitian .....	47
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	48
Tabel 3.3 Data Uji Validitas Pencegahan Kecurangan.....	50
Tabel 3.4 Data Uji Validitas Peran Internal Audit .....	51
Tabel 3.5 Data Uji Validitas Dewan Komisaris .....	51
Tabel 3.6 Data Uji Reliabilitas .....	53
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Umur Responden .....	61
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden .....	62
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden.....	62
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Pencegahan Kecurangan .....	63
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Peran Internal Audit .....	67
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Dewan Komisaris .....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier.....	78
Tabel 4.10 Hasil Uji F .....	80
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	81

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas P-Plot .....	76
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedasistas.....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap perusahaan pada dasarnya menghendaki laporan keuangan yang diterbitkannya menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan terbaik atau menguntungkan. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindak kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan yang dapat menyesatkan *stakeholder*. Laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan menimbulkan turunnya integritas informasi keuangan dan menjadi sumber informasi yang tidak valid untuk digunakan sebagai dasar analisis dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, karyawan, auditor dan kompetitor (Muhammad Ansar, 2011).

Kecurangan telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Indikasi adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain (Tiara Delfi, 2014)

Kecurangan atas laporan keuangan termasuk dalam tindakan *fraud* dan dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) (Salman dalam Muhammad Ansar, 2011). *Fraud* (Kecurangan) menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak pihak lain (Amin Widjaja, 2016).

Di Indonesia, kasus kecurangan pelaporan keuangan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain sanksi yang diberikan kepada PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI). Keempat emiten terbukti melakukan *fraud* melalui manipulasi laporan penyajian penggunaan dana hasil penawaran umum (Raharjo, 2010). PT KF melebih-sajikan penjualan dan persediaan 3 unit usaha, meningkatkan harga persediaan serta melakukan pencatatan ganda atas penjualan 2 unit usaha (Bapepam, 2002 dalam Dwi Shinta Mahesarani, 2016).

Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan (Wilopo, 2006). Hal senada juga dikemukakan Ardiana Peni Rahmawati dan Idjang Soetikno (2012) bahwa kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan/ peluang tersebut ada. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan).

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan (*fraud*). Kecurangan dengan cara menyalahi sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Valery G. Kumaat, 2011).

Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian audit internal. Peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan perusahaan sesuai dengan kemajuan jaman (Ruslan, 2009).

Auditor internal sering ditemui pada perusahaan-perusahaan besar yang mana perusahaan besar memiliki banyak bagian atau departemen yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tugas dari internal auditor adalah menjamin pengendalian internal atau sistem pengendalian yang telah dijalankan di dalam perusahaan tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan sehingga dapat meminimalkan resiko penyimpangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan yang telah dirumuskan oleh manajemen (Mulyadi, 2002).

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai

sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2001, SA seksi 230.06).

Pengangkatan auditor bukan karena kompetensi yang dimilikinya melainkan karena kedekatannya dengan beberapa pimpinan di perusahaan, tidak diterapkannya seleksi yang tepat menyebabkan hasil laporan yang diterima tidak kompeten dan memiliki kualitas rendah (Hermiyetti, 2007). Oleh karena itu, Standar Profesi Audit Internal (1210.2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan Standar Internal Audit (SIAS) No. 3 menyatakan bahwa internal audit diwajibkan untuk mewaspadaai kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, konflik kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan pada saat pelaksanaan audit.

Standar Profesi Audit Internal (1210.2) yang disusun oleh *Institute of internal auditor* (2012) mengemukakan bahwa audit internal dapat mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan dengan cara menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal diduga telah terjadi penyimpangan dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan apa yang tepat dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), pendeteksian dini kecurangan (*early fraud detection*), investigasi kecurangan (*fraud investigation*) dan penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*).

Selain internal audit, dewan komisaris juga memiliki peran terhadap pencegahan *fraud*. Dewan komisaris berperan dalam sebagai organ pengawas dalam perusahaan (UU PT No 40 tahun 2007 pasal 108). Dewan komisaris independen yang mampu memberikan *independent judgement* terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan (OECD, 2004). Hal ini tentunya untuk meyakinkan bahwa anggota dewan komisaris perusahaan dapat bekerja secara independen dan menghindari terjadinya *conflict of interest*, yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan tindak kecurangan. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Tugas dari komite ini salah satunya adalah berperan dalam memastikan *internal control* perusahaan berjalan secara efektif (Kadek Utami Kusumaningsih & I Gde Ary Wirajaya, 2017).

Kusumawardhani (2013) dalam Kadek Utami Kusumaningsih & I Gde Ary Wirajaya (2017) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang cukup besar dalam perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Dewan komisaris independen dengan statusnya yang tidak terafiliasi tentu diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan perusahaan. Semakin besar proporsi dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam meminimalisir tindak kecurangan di dalam perusahaan.

PT. Pinang Witmas Sejati merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sekaligus pengolahan hasil sawit menjadi minyak mentah

(CPO) dan mengelola dana yang bersumber dari beberapa orang pemegang saham, oleh karenanya PT. Pinang Witmas Sejati memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada para pemegang saham. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari *stakeholder* mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang terbebas dari unsur *fraud*. Namun kejadian *fraud* pernah terjadi di PT. Pinang Witmas Sejati Palembang pada tahun 2013 – 2015 yang dilakukan oleh beberapa manajer bagian divisi dengan membuat harga yang tidak sesuai dengan harga pasar (*mark up*) didukung dengan adanya kesempatan.

Hal ini disebabkan seorang auditor di dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan manajer PKS tersebut. Pengangkatan auditor pada perusahaan tidak melalui prosedur yang diantaranya adalah tanpa sepengetahuan pihak dewan komisaris serta auditor yang diangkat tidak memiliki kemampuan sebagai seorang auditor. Kecurangan terungkap setelah salah satu seorang anggota dewan komisaris membawa seorang auditor dari luar perusahaan karena dewan komisaris tersebut curiga terhadap harga pembelian penyulingan pipa *boiler* yang tidak sesuai dengan harga dipasaran.

Peran internal audit dan pengawasan dari dewan komisaris sangat rendah dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Peran Internal Audit Dan Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pencegahan kecurangan masih sangat rendah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat terjadinya kecurangan.
2. Peran internal audit belum efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor.
3. Kurang maksimalnya peran komite audit sehingga salah satu dewan komisaris ikut memeriksa kinerja komite audit dengan menemukan adanya kecurangan.

## **C. Rumusan Masalah**

Mengingat banyaknya pembahasan tentang pencegahan kecurangan, maka dalam penelitian ini hanya menfokuskan tentang pengaruh peran internal audit dan dewan komisaris terhadap pencegahan kecurangan sehingga dari identifikasi masalah di atas dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang?
3. Apakah peran internal audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh internal audit dan dewan komisaris terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat lebih mengefektifkan peran internal audit dan dewan komisaris dalam pencegahan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengalaman dan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pencegahan kecurangan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Dasar pemikiran dari penelitian ini diawali dari penelitian Halla (1999) dalam penelitiannya “*Aview of Corporate Governance and Control in Finland*” yang menjelaskan bahwa tanggungjawab dewan komisari adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian aset dan akuntansi telah diorganisir

cukup memadai. Pembagian tanggung jawab sehubungan dengan internal kontrol diantara semua anggota organisasi dari atas sampai bawah yaitu dewan komisaris memberikan pengarahan dan wawasan, pimpinan puncak menetapkan internal kontrol, menetapkan etika dan iklim organisasi, senior manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih rinci dan personal lainnya bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Proporsi dewan komisaris independen yang cukup besar dalam perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Selain itu penelitian tentang pencegahan kecurangan pernah dilakukan oleh Suginam (2016) yang berjudul Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia) serta penelitian Gusnardi (2011) yang berjudul Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut belum pernah dilakukan penelitian dimana faktor dewan komisaris dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan sehingga pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan menambah variabel dewan komisaris sebagai faktor yang mempengaruhinya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

Pada bagian ini diuraikan mengenai konsep-konsep dari masing-masing variabel yang diteliti yaitu pencegahan kecurang, peran internal audit dan dewan komisaris yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kecurangan (*Fraud*)**

##### **a. Pengertian Kecurangan**

*Fraud* (Kecurangan) menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak pihak lain (Amin Widjaja, 2016, hal.34). Kecurangan (*fraud*) dalam kehidupan sehari-hari dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam, *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain (Pusdiklatwas BPKP, 2008, hal.11).

Sedangkan *Black's law dictionary* dalam Amin Widjaja Tunggal (2013, hal. 2) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah: “*fraud is a generic term embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and*

*invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud , as it includes surprise , trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knacery* {Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus) manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia}.

Theodorus M. Tuannakotta (2007, hal.96) menyatakan bahwa “kecurangan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain”.

Karyono (2013, hal.47) mengartikan mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*).

Fitrawansyah (2014, hal.16) mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu bandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut, dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan untuk merugikan suatu organisasi atau pihak lain.

#### **b. Penyebab Kecurangan**

Amin Widjaja Tunggal (2012, hal.10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah:

1) Insentif atau tekanan

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.

2) Kesempatan

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*.

### 3) Sikap atau rasionalisasi

Ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Kecurangan (*fraud*) pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada serta adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* dapat diartikan sebagai pola pemanfaatan kesempatan/peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Menurut Valery G. Kumaat (2011, hal.139) bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) tersebut adalah:

- 1) Desain pengendalian internal kurang tepat sehingga meninggalkan celah risiko.
- 2) Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
- 3) Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi proses bisnis.
- 4) Evaluasi yang tidak berjalan terhadap proses bisnis yang berlaku.

Sementara Bologna, Jack dalam Karyono (2013, hal.10) menyatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

- 1) *Greed* (keserakahan)
- 2) *Opportunity* (kesempatan)
- 3) *Need* (kebutuhan)
- 4) *Exposure* (pengungkapan)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan dan adanya kesempatan, keserakahan, kebutuhan serta kurangnya pengawasan internal dalam suatu organisasi.

### **c. Pencegahan Kecurangan**

Pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur (Diaz Priantara, 2013, hal.184).

Pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati (Fitrawansyah, 2014,hal.16).

Karyono (2013, hal.87) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* yang paling efektif dengan biaya yang murah, sehingga harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kecurangan.

**d. Metode Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Karyono (2013, hal.48) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen, yaitu :

- 1) Mencegah kecurangan (*fraud*) dengan menerapkan kendali intern yang andal.

Pengendalian intenal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris atau entitas, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pencegahan terjadi apabila pengendalian tersebut dapat mendeteksi adanya *fraud* pada suatu aktivitas tanpa menunggu adanya audit.

- 2) Mencegah *fraud* menurut teori *Trangle Fraud*

Menurut segitiga *fraud* (*triangle fraud*), faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah tekanan, kesempatan dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:

- a) Mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan.

- b) Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan
  - c) Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai.
- 3) Mencegah kecurangan (*fraud*) menurut *Gone Theory*

Menurut Ghone Theory, faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

- a) Keserakahan (*greeds*)

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir antara lain dilakukan dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar, perbaikan sistem pendidikan, peningkatan fasilitas umum diantaranya transportasi, pembenahan atau penerapan secara konsisten kode etik pegawai.

- b) Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan berkaitan dengan adanya keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah dapat saja terjadi tindak kecurangan apapun karena lemahnya struktur pengendalian internalnya. Untuk mencegahnya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal, peningkatan keteladanan dari semua individu, mengembangkan kepemimpinan yang tangguh,

menetapkan etika ada aturan perilaku bagi setiap profesi yang merupakan batasan setiap profesi dalam bekerja.

c) *Kebutuhan (Needs)*

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak untuk mengatasi perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan sistem kinerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperhatikan secara adil.

d) *Pengungkapan (Exposure)*

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, antara lain perlu dilakukan pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

e) Bentuk pranata hukum yang tegas.

f) Penyebarluasan produk hukum.

Sedangkan Pusdiklatwas BPKP (2008, hal.38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

- 1) Penetapan kebijakan anti *fraud*.
- 2) Prosedur pencegahan baku.

- 3) Organisasi.
- 4) Teknik pengendalian.
- 5) Kepekaan terhadap *fraud*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pencegahan kecurangan adalah menerapkan kendali intern yang andal, mengurangi tekanan, kesempatan dan pembenaran melakukan kecurangan.

**e. Tujuan Pencegahan Kecurangan**

Pusdiklatwas BPKP (2008, hal.38) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan yaitu:

- 1) *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
- 2) *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba.
- 3) *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
- 4) *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
- 5) *Civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah *fraud*, yaitu:

1) Budaya jujur dan etika yang tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi mencakup enam unsur, yaitu:

a) Menetapkan *Tone at the Top*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan "*Tone at the Top*" terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. *Tone at the top* yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode etik perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

b) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam atau diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan *fraud* terhadap perusahaan.

c) Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat

Agar berhasil mencegah *fraud*, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting.

Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Setelah seorang pegawai diangkat, evaluasi yang berkelanjutan atas kepatuhan pegawai itu pada nilai-nilai dan kode perilaku perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan *fraud*.

d) Pelatihan

Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap *fraud* juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu, misalnya, pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan penjualan.

e) Konfirmasi

Sebagian perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik mengkonfirmasi tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan *fraud* atau pelanggaran etika lainnya.

2) Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*

*Fraud* tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah *fraud*, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

3) Pengawasan oleh komite audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan fraud oleh manajemen dan program serta pengendalian anti *fraud*. Komite audit juga membantu menciptakan “*tone at the top*” yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap *fraud*.

**f. Indikator Pencegahan Kecurangan**

Siti Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati (2010, hal.64) mengemukakan bahwa *fraud* dapat dicegah, cara pencegahan ini mencakup:

- a. Tingkatkan pengendalian intern.
- b. Menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*).
- c. Upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*).
- d. Lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan tenaga psikolog dan hindari dalam penerimaan pegawai.

- e. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai dan timbulkan *sense of belonging*.
- f. Lakukan pembinaan rohani.
- g. Berikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan kecurangan dan berikan
- h. Prestasi bagi pegawai yang berprestasi.

Sedangkan menurut Amrizal (2004) yang dikutip Diaz Priantara (2013, hal.196), menyatakan kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut:

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian.
3. Meningkatkan kultur organisasi.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

**g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan**

Selain pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat pula faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan diantaranya adalah audit internal. Peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*) perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan (Gusnardi, 2009).

Amin Widjaja Tunggal (2008, hal.48) mengemukakan bahwa audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi *fraud*.

Gusnardi (2009) menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal audit internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Mulyadi (2008, hal.180) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Hal senada juga dikemukakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seperti dinyatakan dalam PSA Nomor: 69 (IAI, 2001:319.2) yang mengartikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pencegahan kecurangan dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris.

## 2. Peran Internal Audit

### a. Pengertian Internal Audit

Sukrisno Agoes (2012, hal.204) mendefinisikan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain.

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro Tugiman, 2001, hal.11)

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA, 2004, hal.70) menyatakan: “*Internal auditing is an independet appraisal function establisher within an organization*” Artinya : audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan organisasi.

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Mulyadi (2002, hal.211) menyatakan bahwa audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan

dengan cara memeriksa akuntansi dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Setiap bagian dari organisasi diberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004, hal.8) mengatakan bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter audit internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

Hiro Tugiman (2003, hal.27-29) menyatakan bahwa kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh bagian audit internal adalah:

##### 1) Personalia

Bagian audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para auditor internal telah sesuai bagi audit yang akan dilaksanakan. Hiro Tugiman (2003, hal.27) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagian audit internal, yaitu:

- a) Pimpinan audit internal harus menetapkan kriteria pendidikan dan pengalaman yang sesuai dalam mengisi jabatan di bagian

audit internal dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan dan tingkat tanggung jawabnya.

b) Harus diperoleh kepastian yang pantas dan masuk akal tentang kualifikasi dan kemampuan setiap calon auditor.

2) Pengetahuan dan kecakapan

Staf audit internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan audit dalam organisasi perusahaan. Misalnya kemampuan dalam menerapkan standar audit, prosedur dan teknik-teknik audit.

3) Pengawasan

Kepala bagian audit internal bertanggung jawab melakukan pengawasan audit yang pantas. Pengawasan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan kesimpulan hasil audit yang telah dilakukan. Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal (2003, hal.28) menyatakan bahwa “bagian audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

**c. Peran Internal Audit**

Menurut modul internal auditor di Abad 21 (YPIA, 1999, hal. 25-26) disebutkan bahwa auditor internal memiliki 3 (tiga) peran, yaitu :

1. *Watch dog*

Auditor internal memperhatikan dan mengingatkan, yaitu :

- a. Peran sebagai *watch dog* melibatkan observasi, penghitungan dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi.
  - b. Proses audit utama dari peran *watch dog* ini adalah *compliance audit* (audit ketaatan). Audit ketaatan ini berfokus pada variasi yang ada pada sistem (kesalahan, penghilangan, penundaan dan kecurangan).
  - c. Audit ketaatan merupakan cara untuk mengidentifikasi variasi-variasi yang ada pada sistem sehingga perbaikan bisa dilakukan.
2. *Consultant* : auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu sebagai *partner* dari manajemen.
    - a. Ruang lingkungannya : ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
    - b. Fokus pada perannya sebagai konsultan adalah pemeliharaan sumber daya perusahaan dan membantu manajemen untuk mengurusnya.
  3. *Catalyst* : auditor internal mengarahkan dan menggerakkan yang lain untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior. Sebagai *catalyst*, auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang.

Tanggung jawab internal auditor dalam pencegahan, pendeteksian dan menginvestigasi perbuatan kecurangan masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam profesi audit, khususnya pada lembaga audit internal.

Namun demikian tidak bisa dibantah bahwa internal auditor memegang peranan penting dalam mendukung penerapan *good corporate governance*. Keterlibatan internal auditor dengan aktivitas operasional sehari-hari termasuk keterlibatan dalam proses pelaporan transaksi keuangan dan struktur pengendalian intern memberi kesempatan internal auditor untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Efektivitas internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum semua jajaran direksi mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan, pendeteksian dan investigasi kecurangan pada internal auditor.

Standar Profesi Audit Internal (1210.2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan standar internal audit (SIAS) No. 3 menyatakan bahwa internal audit diwajibkan untuk mewaspadaai kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, konflik kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan pada saat pelaksanaan audit.

Secara garis besar pencegahan dan pendeteksian serta investigasi merupakan tanggung jawab manajemen, akan tetapi internal auditor

diharapkan dapat melakukan tiga hal tersebut di atas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manajemen. Dalam perkembangannya, penugasan dalam memerangi kecurangan saat ini telah mengarah pada profesi tersendiri, seperti *Certified Fraud Examiners* (CFE) ataupun akuntan forensik.

Dalam menjalankan tugas auditnya, internal auditor harus waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya peluang atau kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam kenyataannya, kewaspadaan dan sifat skeptik yang pada tempatnya, mungkin merupakan dua keterampilan yang penting bagi internal auditor. Penyelidikan yang kritis terhadap kemungkinan kecurangan harus diikuti oleh penilaian terhadap pengendalian yang ada, praktik pengendalian dan seluruh lingkup pengendaliannya yang potensial. Untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan/ organisasi, sering kali dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal.

Internal auditor harus bertindak secara proaktif dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan, khususnya keterlibatan secara aktif dalam mengevaluasi struktur pengendalian intern perusahaan dan status organisasi. Efektivitas internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sering kali terkendala oleh waktu dan besarnya biaya untuk menilai/menguji prosedur, kebijakan manajemen dan pengujian atas pengendalian.

Internal auditor berada dalam posisi yang penting untuk memonitor secara terus menerus struktur pengendalian intern perusahaan melalui

identifikasi dan deteksi atas tanda-tanda (*red flags*) yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan. Internal auditor berada pada posisi yang tepat untuk memahami seluruh aspek tentang struktur organisasi, tempat pelatihan yang tepat, pemahaman mereka tentang sumber daya manusia yang ada, memahami kebijakan dan prosedur operasi, dan memahami kondisi bisnis dan lingkungan pengendalian intern yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda atau gejala (*symptom* ataupun *red flag*) kemungkinan terjadinya kecurangan.

Para internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diatur secara jelas dalam kewenangan pelaporan dan standar profesi. Komisi *Treadway* (*The Treadway Commission*, 1987) merekomendasikan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Demikian pula dalam Pernyataan Standar Internal Audit mensyaratkan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan mengidentifikasi tanda-tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, menginvestigasi gejala kecurangan dan melaporkan temuannya pada komite audit atau kepada tingkat manajemen yang tepat.

Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan oleh jajaran direksi (*top management*) baik secara individual maupun bersama-sama (*fraud management*) yang dalam cakupan penugasan audit mungkin luar jangkauan kewenangan internal auditor. Pada dasarnya dalam menjalankan tugas audit

regular, internal auditor perlu mewaspadaai terjadinya kecurangan yang dapat mempengaruhi kualitas, integritas dan keandalan pelaporan transaksi keuangan perusahaan.

Dalam hal ini, internal auditor harus menginvestigasi secara menyeluruh kemungkinan terjadinya kecurangan dan mengkomunikasikan kepada komite audit terhadap adanya indikasi kecurangan. Dengan demikian, hubungan kerjasama yang erat antara dewan komisaris dengan fungsi audit internal, khususnya melalui pertemuan-pertemuan antara ketua komite audit dengan kepala Satuan Pemeriksa Intern (SPI), akan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja internal auditor dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Secara tidak langsung internal auditor akan lebih mampu berperan dalam memantau kemungkinan terjadinya kecurangan pada level pembuat kebijakan. Situasi demikian ini akan memberikan peluang bagi internal auditor untuk berperan aktif dalam pengujian integritas, kualitas, dan keandalan proses pembuatan hingga implementasi kebijakan yang dilakukan oleh top manajemen. Bahkan dalam laporannya pada tahun 1999, COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) mendorong agar internal auditor mampu dan dapat berperan secara aktif dalam menilai kualitas, keandalan dan integritas manajemen puncak dalam pembuatan dan implementasi kebijakan agar terbebas dari unsur perbuatan kecurangan.

Berkenaan dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, Pernyataan Standar Internal Auditor (SIAS) No.3 menguraikan

mengenai tanggungjawab internal auditor untuk pencegahan kecurangan, yaitu : “memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, berkaitan dengan pengungkapan risiko potensial pada berbagai bentuk kegiatan/operasi organisasi”. Standar ini secara jelas mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan adalah tanggung jawab manajemen. Meskipun demikian, internal auditor harus menilai kewajaran dan efektivitas tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kemungkinan penyimpangan atas kewajiban tersebut.

Dapat kita lihat bahwa SIAS N0.3 menjelaskan tanggung jawab internal auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mencakup :

- 1) Internl auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas kecurangan agar dapat mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda *fraud* yang mungkin akan terjadi.
- 2) Internal auditor harus mempelajari dan menilai struktur pengendalian perusahaan untuk mengidentifikasi timbulnya kesempatan terjadinya kecurangan, seperti kurangnya perhatian dan efektivitas terhadap sistem pengendalian intern yang ada.

#### **d. Standar Profesi Audit Internal**

Hiro Tugiman (2003, hal.4) mengemukakan bahwa standar profesi audit internal meliputi:

- 1) Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para pemeriksa internal.

- 2) Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama para auditor internal.

Peran aktivitas audit internal dengan komite audit sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Profesional Audit Internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004) yang meliputi :

- 1) Meminta komite untuk secara tahunan *mereview* dan menyetujui *charter* audit internal.
- 2) Bersama-sama komite *mereview* fungsi dan tanggung jawab laporan administrasi audit internal untuk memastikan bahwa struktur organisasi berjalan sehingga pemeriksa internal cukup independen.
- 3) Di dalam *charter* dimuat bahwa komite audit *mereview* keputusan dan pengangkatan Penanggungjawab Fungsi Audit Internal (PFAI), termasuk penunjukan dan pemberhentian serta kompensasi PFAI.
- 4) Di dalam *charter* dimuat bahwa komite audit *mereview* dan menyetujui usulan untuk melakukan *outsourcing* beberapa aktivitas audit internal tertentu.
- 5) Membantu komite audit mengevaluasi kecukupan personalia, *budget*, dan cakupan serat hasil pelaporan aktivitas audit internal.
- 6) Memberikan informasi atas koordinasi fungsi kontrol dan monitoring lainnya, misal : manajemen risiko, kepatuhan, *security*, kelangsungan bisnis, legal, etik, lingkungan, audit eksternal.

- 7) Memberikan informasi atas status, posisi rencana pemeriksaan tahunan serta kecukupan sumber daya dalam melaksanakan tujuannya kepada manajemen senior dan komite audit.
- 8) Melaporkan pelaksanaan rencana pemeriksaan tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh manajemen dan komite audit.
- 9) Memasukkan ke dalam *charter* audit internal tanggung jawab dari FAI untuk melaporkan ke komite audit secara tepat waktu setiap dugaan *fraud* yang melibatkan manajemen atau pegawai yang secara signifikan terlibat.

### **3. Dewan Komisaris**

#### **a. Pengertian Dewan Komisaris**

Pasal 1 angka 6 UUPT yang mendefinisikan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (Moenaf H. Regar, 2000, hal.40).

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT) (id.wikipedia.org, 2017).

#### **b. Prinsip Dewan Komisaris**

Pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) mengemukakan bahwa pada prinsipnya komisaris

bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah:

- 1) Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.
- 2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
- 4) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- 5) Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka
- 6) Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan

oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.

- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite.

Berdasarkan pedoman KNKG, komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:
  - (a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
  - (b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
  - (c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
  - (d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
- 2) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris;
- 3) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite audit diketuai oleh

komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Menurut Gusnardi (2009, hal.133) yang mengutip beberapa pendapat seperti yang dikemukakan Rindove (1999) yang dimuat dalam *Journal of Management Studies; What Corporate Boards Have to do with Strategy: a Cognitive Perspective* menyatakan bahwa komite audit harus memainkan peranan penting sebagai sistem pemantauan internal untuk memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan manajemen konsisten dengan kepentingan para pemegang saham. Serta pendapat DeZoort et.al (2001) yang menyatakan bahwa dalam perkembangannya, komite audit bertugas mengawasi tanggung jawab manajemen dalam hal pelaporan keuangan. Peran tersebut mengalami perkembangan saat ini sehingga komite audit juga bertugas untuk mengawasi pengendalian internal dan kegiatan auditor.

### **c. Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris**

Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi. Dalam keadaan normal, masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Gatot Supramono, 2008,

hal. 143). Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan perseroan dan *stakeholders* (Ridwan Khairandy, 2008, hal.244).

Fungsi Dewan Komisaris termasuk anggota Komisaris Independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:

- 1) Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
- 2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG. Agar supaya fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD sebagai “*agent*” atau bias kepada “kepentingan pemilik”. Dalam hal ini Komisaris Independen dapat berperan dalam untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi dari dewan komisaris yaitu: dewan komisari bertanggungjawab atas pengawasan perseroan, setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Sementara itu tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewasa ini dewan komisaris merupakan lembaga pengawasan semata-mata untuk kepentingan perseroan, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham tetapi harus mempertahankan kepentingan dari perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham. Dewan komisaris ini mempunyai tugas sendiri yang merupakan organ perseroan tetapi bukan wakil dari pemegang saham atau pihak-pihak yang berkepentingan (Moenaf H. Regar, 2000, hal.40).

Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris, yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Di samping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan satu 1 (satu) orang komisaris utusan (luas sempitnya tugas komisaris utusan ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan) (Gunawan Widjaja, 2008, hal.80).

Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat adalah tugas atau kewajiban dewan komisaris dan apabila tidak dilakukan dapat diminta pertanggungjawaban. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dapat juga dianggap sebagai hak dewan komisaris. Tetapi apabila dianggap sebagai hak dan bukan sebagai tugas atau kewajiban maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila hak itu tidak digunakan. Secara umum meliputi :

- 1) Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasar menentukan rencana kerja hanya mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT).
- 2) Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi juga wajib ditandatangani oleh semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT).
- 3) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpang salinannya (Pasal 116 UUPT).
- 4) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 UUPT).
- 5) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru sampai kepada RUPS (Pasal 116 UUPT).
- 6) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPT) (Moenaf H. Regar, 2000, hal. 66-69).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Gusnardi (2011)	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan	Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan
2.	Suginam (2016)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)	Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
3.	Ety Meikhati dan Istiyawati Rahayu (2015)	Peranan Audit Internal Dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta)	Peranan audit internal dan pencegahan <i>fraud</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal di Yayasan Internusa.

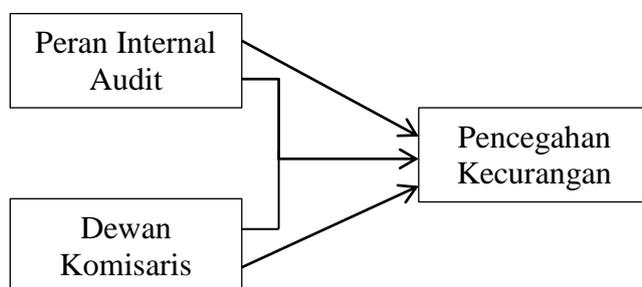
## C. Kerangka Konseptual

*Fraud* (Kecurangan) menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak pihak lain (Amin Widjaja, 2016). Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian audit internal. Peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan perusahaan sesuai dengan kemajuan jaman (Ruslan, 2009). Standar Profesi Audit Internal (1210.2) yang disusun oleh *Institute of internal auditor* (2012) mengemukakan bahwa audit internal dapat mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan dengan cara menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam

hal diduga telah terjadi penyimpangan dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan apa yang tepat dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada.

Selain internal audit, dewan komisaris juga memiliki peran terhadap pencegahan *fraud*. Dewan Komisaris berperan dalam sebagai organ pengawas dalam perusahaan (UU PT No 40 tahun 2007 pasal 108). Dewan komisaris independen yang mampu memberikan *independent judgement* terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan (OECD, 2004). Hal ini tentunya untuk meyakinkan bahwa anggota dewan komisaris perusahaan dapat bekerja secara independen dan menghindari terjadinya *conflict of interest*, yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan tindak kecurangan (Kusumaningsih & Wirajaya, 2017, hal.1843).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran internal audit dan dewan komisaris dapat mencegah terjadinya kecurangan atau dengan kata lain bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah audit internal dan dewan komisari. Gambaran pengaruh tersebut dapat terlihat pada kerangka konseptual di bawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Dari uraian teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran internal audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.
2. Dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.
3. Peran internal audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pinang Witmas Sejati Palembang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran ataupun sebagai pemecahan masalah terhadap apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Sugiyono (2012, hal.2) mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kuantitatif. Selanjutnya Sugiyono (2012, hal.36) mengatakan bahwa penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Selanjutnya Sugiyono (2012, hal.14) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistika.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit Indonesia-Malaysia PT. Pinang Witmas Sejati (PKS) Kecamatan Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan Palembang. Penelitian dilaksanakan pada Januari s/d Maret 2018. Tahapan penelitian tampak pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tahapan Penelitian**

Deskripsi	Desember			Januari				Februai				Maret			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul, Literatur <i>review</i> berkaitan judul															
Penyusunan proposal															
Bimbingan proposal															
Seminar proposal															
Pengumpulan Pengolahan dan Analisis DAta															
Seminar hasil															
Sidang tesis															

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, hal.115).

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. General Manajer : 1 orang
  - b. Manajer : 1 orang
  - c. Asisten Kepala : 4 orang
  - d. Asisten : 4 orang
  - e. staf : 27 orang
- jumlah : 37 orang

## 2. Sampel

Sampel di dalam penelitian ini diambil berdasarkan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012, hal.96). Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sampel di dalam penelitian ini sebanyak 37 responden yang meliputi general manajer, manajer, asisten kepala, asisten dan staf.

### D. Definisi Operasional Variabel

Sularso (2003) mengemukakan bahwa variabel adalah komponen utama dalam masalah, kerangka teoritis dan hipotesis. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (dependen) adalah pencegahan kecurangan (Y)
2. Variabel bebas (independen) terdiri dari peran internal audit ( $X_1$ ) dan dewan komisaris ( $X_2$ ).

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pencegahan Kecurangan (Y)	menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan <i>fraud</i> dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (Diaz Priantara, 2013)	a. Penetapan kebijakan anti <i>fraud</i> b. Prosedur pencegahan baku c. Teknik pengendalian	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
2.	Peran Internal Audit ( $X_1$ )	suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro Tugiman, 2001)	a. <i>Watch dog</i> b. <i>Consultant</i> c. <i>Catalyst</i>	Ordinal
3.	Dewan Komisaris ( $X_2$ )	organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (Moenaf H. Regar, 2000)	a. Pengawasan b. Memberikan nasihat	Ordinal

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang dihimpun melalui kuesioner. Sugiyono (2015, hal.223) mengemukakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.

Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini berupa studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, majalah dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan kajian pustaka.

Untuk mengukur masing-masing variabel, peneliti menggunakan skala Likert yang terdiri dari jika menjawab sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2 dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Sebelum instrumen penelitian dipakai dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2010). Validitas alat ukur uji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan adalah *Product Moment Pearson* menggunakan bantuan program SPSS 17.0 dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum X \sum y)}{\sqrt{\{(N \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(N \sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = korelasi *product moment pearson* item dengan soal

$\sum X$  = total nilai keseluruhan subjek per item

$\sum y$  = total nilai per subjek

$N$  = jumlah subjek

Nilai korelasi ( $r$ ) dapat dilihat dari tabel *correlation* kolom skor total baris *pearson correlation*. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of significant* = 5% dengan interpretasi data jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti valid demikian sebaliknya sehingga  $r_{tabel}$  untuk pengujian validitas dengan taraf kemaknaan  $\alpha = 0,05$  dan sampel sebanyak  $n = 30$  maka  $r_{tabel}$  diperoleh 0,361. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di perusahaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**a. Variabel Pencegahan Kecurangan**

Kuesioner pencegahan kecurangan menggunakan skala Likert dengan 13 item soal yang dilakukan uji validitas. Hasil uji validitas diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Uji Validitas Pencegahan Kecurangan**

No Item	Correct Item Total Corelation	Keterangan
1	0,970	Valid
2	0,970	Valid
3	0,970	Valid
4	0,970	Valid
5	0,970	Valid
6	0,970	Valid
7	0,070	Tidak Valid
8	0,458	Valid
9	0,489	Valid
10	0,970	Valid
11	0,970	Valid
12	0,970	Valid
13	0,970	Valid

Berdasarkan tabel 3.3 di atas diketahui bahwa dari 13 butir soal yang diajukan, terdapat 1 item soal yang tidak valid yaitu item no. 7 sehingga kuesioner pencegahan kecurangan yang dipakai di dalam penelitian sebanyak 12 item soal.

#### **b. Variabel Peran Internal Audit**

Kuesioner peran internal audit menggunakan skala Likert dengan 10 item soal yang dilakukan uji validitas. Hasil uji validitas diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Data Uji Validitas Peran Internal Audit**

<b>No Item</b>	<b><i>Correct Item Total Corelation</i></b>	<b>Keterangan</b>
1	0,983	Valid
2	0,983	Valid
3	0,983	Valid
4	0,468	Valid
5	0,983	Valid
6	0,983	Valid
7	0,983	Valid
8	0,468	Valid
9	0,983	Valid
10	0,983	Valid

Berdasarkan tabel 3.4 di atas diketahui bahwa dari 10 butir soal yang diajukan, semua item soal valid sehingga kuesioner peran internal audit yang dipakai di dalam penelitian sebanyak 10 item soal.

#### **c. Variabel Dewan Komisaris**

Kuesioner dewan komisaris menggunakan skala Likert dengan 10 item soal yang dilakukan uji validitas. Hasil uji validitas diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Uji Validitas Dewan Komisaris**

No Item	Correct Item Total Corelation	Keterangan
1	0,955	Valid
2	0,955	Valid
3	0,516	Valid
4	0,955	Valid
5	0,427	Valid
6	0,516	Valid
7	0,955	Valid
8	0,955	Valid
9	0,955	Valid
10	0,502	Valid

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui bahwa dari 10 butir soal yang diajukan, semua item soal valid sehingga kuesioner dewan komisaris yang dipakai di dalam penelitian sebanyak 10 item soal.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Untuk menguji reliabilitas maka digunakan rumus *Alpha* sebagai berikut:

$$r_{ii} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

$r_{ii}$  = Reliabilitas Instrumen

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = Varians total

Suharsimi Arikunto (2009, hal.76) mengemukakan bahwa untuk memperoleh jumlah varians butir, harus dicari terlebih dahulu varians setiap butir yaitu sebagai berikut:

$$\sigma_b^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

Keterangan:

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat varians tiap butir

N = Jumlah responden

Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2009, hal.76) menyatakan bahwa untuk mencari varians total adalah sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = \frac{JK - \frac{JK^2}{N}}{N}$$

Keterangan :

JK = Jumlah kuadrat skor total

N = Jumlah responden

Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > nilai  $r_{\text{tabel}}$ . Data reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pencegahan Kecurangan	0,788	Reliabel
Peran Internal Audit	0,731	Reliabel
Dewan Komisaris	0,772	Reliabel

Berdasarkan tabel 3.6 di atas diketahui variabel pencegahan kecurangan, peran internal audit dan dewan komisaris dengan nilai cronbach alpa di atas 0,361 sehingga dapat dinyatakan reliabel.

Hasil data yang diperoleh dari uji validitas dan reliabilitas adalah data yang berskala ordinal dan untuk menganalisis pengaruh peran internal audit dan dewan komisaris, skala ordinal ditransformasi ke skala interval menggunakan MSI (*Method Of Successive Interval*).

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrumen penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan reliabilitas (Ghozali, 2011). Perumusan masalah deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi data dari variabel yang diteliti dan sekaligus mengetahui gambaran umum mengenai pencegahan kecurangan, peran internal audit, dewan komisaris.

### **2. Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel

dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004). Persamaan regresi berganda dirumuskan dalam persamaan :  $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$

Keterangan :

Y = Pencegahan Kecurangan

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Peran Internal Audit

$X_2$  = Dewan Komisaris

Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas yang diuraikan sebagai berikut:

a) Uji Normalitas Data

Ghozali (2011) mengemukakan bahwa uji normalitas dilakukan dengan tujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak, yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal grafik. Rumus yang digunakan adalah rumus Kolmogorov Smirnov :

$$KS = \frac{X_i - \bar{X}}{SD}$$

Keterangan :

$X_i$  = Angka pada data

$Z$  = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal

$F_T$  = Probabilitas kumulatif normal; kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi  $Z_i$  dihitung dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik  $Z$ .

$F_S$  = Probabilitas kumulatif empiris (1/data ke n)

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai  $VIF = 1/Tolerance$ . Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai *Tolerance* lebih dari 0,01 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  $VIF=1/1-R^2$

c) Uji Heteroskedasistas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu-satu pengamatan

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastitas dan jika berbeda disebut heterokedastitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heterokedastitas. Pendeteksian heterokedastitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heterokedastitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastitas (Ghozali, 2011).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heterokedastitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heterokedastitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastitas. Selain itu untuk mendukung hasil grafik plot yang ada, maka dilakukan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali, 2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  $U_t = a + b x_t + V_i$

Keterangan :

$U_t$  = Variabel residual

$V_i$  = Variabel kesalahan

### 3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis di dalam penelitian terdiri dari uji F dan uji t yang diuraikan sebagai berikut:

#### a) Uji t

Sunyoto (2013) mengemukakan bahwa pengujian parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Sementara itu Koncoro (2007) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada *output* hasil regresi sudah tercantum secara otomatis nilai  $t_{hitung}$ . Kita hanya memerlukan nilai  $t_{tabel}$  sesuai dengan derajat bebas dan taraf nyatanya. Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy}\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)}}$$

Keterangan :

t = Nilai  $t_{hitung}$

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil  $r_{hitung}$

## b) Uji F

Sunyoto (2013) menjelaskan bahwa pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara  $F_{hitung}$  ( $F_{rasio}$ ) dengan  $F_{tabel}$ . Menurut Koncoro (2007), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*). Pada hasil *output* akan diketahui nilai  $F_{hitung}$ . Untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak  $H_0$ , kita harus membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Ketika  $H_0$  ditolak secara otomatis  $H_1$  diterima. Kesimpulan dari diterimanya  $H_1$  adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Suharyadi dan Purwanto, 2013).

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel Independen

$n$  = jumlah sampel

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun rumus untuk menghitungnya adalah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

$r$  = Koefisien korelasi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Hasil data uji statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut:

##### a) Umur

Melalui penyebaran angket diperoleh data umur responden sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Umur Responden**

Umur	f	%
➤ 21 – 30	9	24,3
➤ 31 – 40	15	40,6
➤ > 40	13	35,1
Jumlah	37	100

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 21 – 30 tahun diperoleh 9 (24,3%), responden berumur 31 – 40 tahun diperoleh 15 (40,6%) dan responden berumur > 40 tahun diperoleh 13 (35,1%).

##### b) Jenis Kelamin

Melalui penyebaran angket diperoleh data jenis kelamin responden sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	f	%
➤ Perempuan	7	18,9
➤ Laki-laki	30	81,1
Jumlah	37	100

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki diperoleh 7 (18,9%), responden berjenis kelamin perempuan diperoleh 30 (81,1%).

**c) Pendidikan**

Melalui penyebaran angket diperoleh data pendidikan responden sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden**

Pendidikan	f	%
➤ SMA	28	75,7
➤ D3	2	5,4
➤ S1	7	18,9
Jumlah	37	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden berpendidikan SMA sebanyak 28 (77,8%), D3 sebanyak 2 orang (5,6%) dan pendidikan S1 diperoleh 7 (18,9%).

**b) Pencegahan Kecurangan**

Analisis jawaban responden pada setiap pertanyaan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh jawaban responden atas pertanyaan pada kuesioner.

Analisis deskriptif juga mengetahui berapa besar persentase jawaban responden pada setiap alternatif jawaban yang ada.

Hasil dari distribusi frekuensi pencegahan kecurangan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Pencegahan Kecurangan**

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perusahaan menetapkan kebijakan anti <i>fraud</i>	7	11.5	24	39.3	16	26.2	13	21.3	1	1.6
2	Adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti <i>fraud</i>	6	9.8	19	31.1	21	34.4	15	24.6	0	0
3	Pengendalian intern perusahaan dengan adanya pemisahan fungsi yang menciptakan kondisi saling cek antar fungsi	5	8.2	20	32.8	20	32.8	10	16.4	6	9.8
4	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem	7	11.5	22	36.1	16	26.2	13	21.3	3	4.9
5	Perusahaan melakukan pengawasan yang memadai	8	13.1	23	37.7	15	24.6	14	23.0	1	1.6
6	Adanya pemeriksaan kembali barang yang keluar masuk di pos satpam	7	11.5	18	29.5	23	37.7	10	16.4	3	4.9
7	Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus	9	14.8	19	31.1	18	29.5	11	18.0	4	6.6
8	Audit internal melakukan pengawasan yang efektif	7	11.5	18	29.5	10	16.4	2	3.3	0	0
9	Ada CCTV termasuk di gudang di dalam pabrik	6	9.8	20	32.8	9	14.8	2	3.3	0	0
10	Melakukan identifikasi kelas-kelas transaksi	9	14.8	16	26.2	11	18.0	1	1.6	0	0

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
11	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem	8	13.1	11	18.0	15	24.6	3	4.9	0	0
12	Perusahaan membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan	5	8.2	21	34.4	9	14.8	2	3.3	0	0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada item soal nomor 1 terkait perusahaan menetapkan kebijakan anti *fraud*, responden memberikan pendapat 11,5% sangat setuju, 39,3% setuju dan 26,2% menyatakan ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar perusahaan sudah menetapkan kebijakan anti *fraud*.
2. Pada item soal nomor 2 terkait adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti *fraud*, responden memberikan pendapat 9,8% sangat setuju, 31,1% setuju dan 34,4% ragu-ragu sedangkan 24,4% menyatakan tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar manajemen dan para karyawan perusahaan telah melaksanakan kegiatan anti *fraud*.
3. Pada item soal nomor 3 terkait pengendalian intern perusahaan dengan adanya pemisahan fungsi yang menciptakan kondisi saling cek antar fungsi, responden memberikan pendapat 8,2% sangat setuju, 32,8% dan 32,8% menyatakan ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan pengendalian intern perusahaan dengan adanya pemisahan fungsi yang menciptakan kondisi saling cek antar fungsi.

4. Pada item soal nomor 4 terkait adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem, responden memberikan pendapat 11,5% sangat setuju, 36,1% setuju, 26,2% ragu-ragu, 21,3% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem.
5. Pada item soal nomor 5 terkait perusahaan melakukan pengawasan yang memadai, responden memberikan pendapat 13,1% sangat setuju, 37,7% setuju, 24,6% ragu-ragu dan 23% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan yang memadai.
6. Pada item soal nomor 6 terkait adanya pemeriksaan kembali barang yang keluar masuk di pos satpam, responden memberikan pendapat 11,5% sangat setuju, 36,1% setuju, 26,2% ragu-ragu, 21,3% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan yang memadai.
7. Pada item soal nomor 7 terkait kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, responden memberikan pendapat 14,8% sangat setuju, 31,1% setuju, 29,5% ragu-ragu dan 18% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah membuat kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus.
8. Pada item soal nomor 8 terkait audit internal melakukan pengawasan yang efektif, responden memberikan pendapat 11,5% sangat setuju, 29,5% setuju, 16,4% ragu-ragu dan 3,3% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar perusahaan telah melakukan pengawasan yang efektif.

9. Pada item soal nomor 9 terkait ada CCTV termasuk di gudang di dalam pabrik, responden memberikan pendapat 9,8% sangat setuju, 32,8% setuju, 14,8% ragu-ragu dan 3,3% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar perusahaan telah membuat CCTV termasuk di gudang di dalam pabrik.
10. Pada item soal nomor 10 terkait melakukan identifikasi kelas-kelas transaksi, responden memberikan pendapat 14,8% sangat setuju, 26,2% setuju, 18% ragu-ragu dan 1,6% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi kelas-kelas transaksi.
11. Pada item soal nomor 11 terkait adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem, responden memberikan pendapat 13,1% sangat setuju, 18% setuju, 24,6% ragu-ragu dan 4,9% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar perusahaan telah membuat prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem.
12. Pada item soal nomor 12 terkait perusahaan membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan, responden memberikan pendapat 8,2% sangat setuju, 34,4% setuju, 14,8% ragu-ragu dan 3,3% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebahagian besar perusahaan telah membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan.

## b) Peran Internal Audit

Hasil dari distribusi frekuensi peran internal audit diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Peran Internal Audit**

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi	10	27,0	21	56,8	6	16,2	0	0	0	0
2	Melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi	8	21,6	20	54,1	8	21,6	1	2,7	0	0
3	Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi	7	18,9	17	45,9	13	35,1	0	0	0	0
4	Auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur	3	8,1	23	62,2	11	29,7	0	0	0	0
5	Staf bagian audit internal boleh dipindahkan untuk sementara waktu oleh departemen fungsional lainnya	11	29,7	21	56,8	5	13,5	0	0	0	0
6	Semua individu yang tergabung dalam tim auditor internal berlatar belakang pendidikan akuntansi	8	21,6	21	58,3	7	18,9	1	2,7	0	0

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
7	Auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang	8	21,6	17	45,9	12	32,4	0	0	0	0
8	Auditor internal telah mempunyai pengalaman di	12	32,4	19	51,4	6	16,2	0	0	0	0
9	Auditor internal memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh bagian akuntansi yang terdapat dalam perusahaan	8	21,6	20	54,1	8	21,6	1	2,7	0	0
10	Auditor internal melaporkan hasil audit internal dan memberi rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelemahan yang ditemukannya	7	18,9	19	51,4	11	29,7	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada item soal nomor 1 terkait melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi, responden memberikan pendapat 27% sangat setuju, 56,8% setuju, 16,2% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa audit internal telah melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi.
2. Pada item soal nomor 2 terkait melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi, responden memberikan pendapat 24,3% sangat setuju,

54,1% setuju, 21,6% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa audit internal telah melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi.

3. Pada item soal nomor 3 terkait melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi, responden memberikan pendapat 18,9% sangat setuju, 45,9% setuju dan 35,1% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa manajemen telah melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi.
4. Pada item soal nomor 4 terkait auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur, responden memberikan pendapat 8,9% sangat setuju, 62,2% setuju, 29,7% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur.
5. Pada item soal nomor 5 terkait staf bagian audit internal boleh dipindahkan untuk sementara waktu oleh departemen fungsional lainnya 29,7% sangat setuju, 56,8% setuju dan 13,5% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah menerapkan staf bagian audit internal boleh dipindahkan untuk sementara waktu oleh departemen fungsional lainnya.
6. Pada item soal nomor 6 terkait semua individu yang tergabung dalam tim auditor internal berlatar belakang pendidikan akuntansi, responden memberikan pendapat 21,6% sangat setuju, 59,5% setuju, 18,9% ragu-ragu.

Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan belum menerapkan audit internal berlatar belakang pendidikan akuntansi.

7. Pada item soal nomor 7 terkait auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang, responden memberikan pendapat 21,6% sangat setuju, 45,9% setuju, 32,4% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa audit internal telah melakukan pencegahan kecurangan dengan mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang.
8. Pada item soal nomor 8 terkait auditor internal telah mempunyai pengalaman di bidangnya, responden memberikan pendapat 32,4% sangat setuju, 51,4% setuju, 16,2% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa auditor internal telah mempunyai pengalaman di bidangnya.
9. Pada item soal nomor 9 terkait auditor internal memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh bagian akuntansi yang terdapat dalam perusahaan, responden memberikan pendapat 21,6% sangat setuju, 56,8% setuju dan 21,6% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan telah menerapkan auditor internal memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh bagian akuntansi yang terdapat dalam perusahaan.
10. Pada item soal nomor 10 terkait auditor internal melaporkan hasil audit internal dan memberi rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelemahan yang ditemukannya, responden memberikan pendapat 18,9% sangat setuju, 51,4% setuju dan 29,7% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa

perusahaan telah menerapkan auditor internal melaporkan hasil audit internal dan memberi rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelemahan yang ditemukannya.

**c) Dewan Komisaris**

Hasil dari distribusi frekuensi dewan komisaris diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Dewan Komisaris**

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Dewan komisaris selalu menanyakan perkembangan keuangan perusahaan	5	13.5	21	56.8	11	29.7	0	0	0	0
2	Dewan komisaris rutin melakukan pengawasan keuangan	6	16.2	17	45.9	13	35.1	1	2.7	0	0
3	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar	1	2.7	15	40.5	19	51.4	2	5.4	0	0
4	Dewan komisaris membentuk komite audit	6	16.2	14	37.8	16	43.2	1	2.7	0	0
5	Dewan komisaris mengawasi kinerja tim internal audit	0	0	17	45.9	17	45.9	3	8.1	0	0
6	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang penerimaan tim internal audit	0	0	11	29.7	23	62.2	3	8.1	0	0
7	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang cara mencegah kecurangan kepada tim internal audit	1	2.7	19	51.4	14	37.8	3	8.1	0	0
8	Dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal	2	5.4	15	40.5	18	48.6	2	5.4	0	0

Item Soal	Pertanyaan	SS		S		R		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
9	Dewan komisaris menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari tim internal audit	3	8.1	19	51.4	14	37.8	1	2.7	0	0
10	Dewan komisaris memberikan nasihat kepada tim internal audit	4	10.8	14	37.8	16	43.2	3	8.1	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada item soal nomor 1 terkait dewan komisaris selalu menanyakan perkembangan keuangan perusahaan, responden memberikan pendapat 13,5% sangat setuju, 56,8% setuju, 29,7% ragu-ragu. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris selalu menanyakan perkembangan keuangan perusahaan.
2. Pada item soal nomor 2 terkait dewan komisaris rutin melakukan pengawasan keuangan, responden memberikan pendapat 16,2% sangat setuju, 45,9% setuju, 35,1% ragu-ragu dan 2,7% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris rutin melakukan pengawasan keuangan.
3. Pada item soal nomor 3 terkait dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar, responden memberikan pendapat 2,7% sangat setuju, 38,9% setuju 40,5% ragu-ragu dan 5,4% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris belum melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar.
4. Pada item soal nomor 4 terkait dewan komisaris membentuk komite audit, responden memberikan pendapat 16,2% sangat setuju, 37,8% setuju, 43,2%

ragu-ragu dan 2,7% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris membentuk komite audit.

5. Pada item soal nomor 5 terkait dewan komisaris mengawasi kinerja tim internal audit, responden memberikan pendapat 45,9% setuju, 45,9% ragu-ragu, 8,1% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris mengawasi kinerja tim internal audit.
6. Pada item soal nomor 6 terkait dewan komisaris memberikan nasihat tentang penerimaan tim internal audit, responden memberikan pendapat 29,7% setuju, 62,2% ragu-ragu, 8,1% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris memberikan nasihat tentang penerimaan tim internal audit.
7. Pada item soal nomor 7 terkait dewan komisaris memberikan nasihat tentang cara mencegah kecurangan kepada tim internal audit, responden memberikan pendapat 2,7% sangat setuju, 51,4% setuju, 37,8% ragu-ragu dan 8,1% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris memberikan nasihat tentang cara mencegah kecurangan kepada tim internal audit.
8. Pada item soal nomor 8 terkait dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal, responden memberikan pendapat 5,4% sangat setuju, 40,5% setuju, 48,6% ragu-ragu dan 5,4% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris belum sepenuhnya memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal.
9. Pada item soal nomor 9 terkait dewan komisaris menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari tim internal audit, responden memberikan pendapat 8,1% sangat setuju, 51,4% setuju, 37,8% ragu-ragu dan 2,7% tidak

setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris tidak sepenuhnya menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari tim internal audit.

10. Pada item soal nomor 10 terkait dewan komisaris memberikan nasihat kepada tim internal audit, responden memberikan pendapat 10,8% sangat setuju, 37,8% setuju, 43,2% ragu-ragu dan 8,1% tidak setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa dewan komisaris belum sepenuhnya memberikan nasihat kepada tim internal audit.

## **2. Hasil Analisis Data**

Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uraian analisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a) Uji Asumsi Klasik**

Proses pengujian asumsi klasik statistik dilakukan bersama-sama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik statistik menggunakan media kotak kerja yang sama dengan uji regresi. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal dengan

melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas**

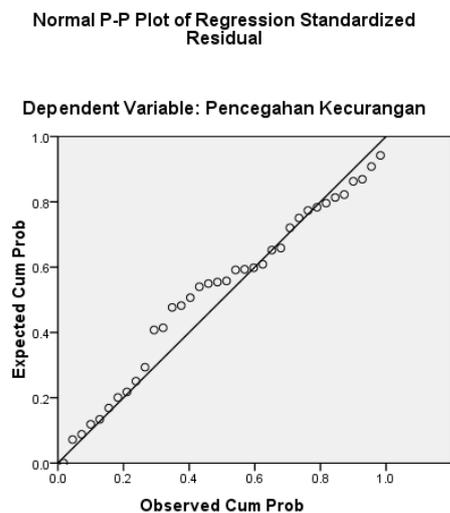
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pencegahan Kecurangan	Peran Internal Audit	Dewan Komisaris
N		37	37	37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	35.531027	23.27114	29.55805
	Std. Deviation	7.9866498	4.801331	6.479123
Most Extreme Differences	Absolute	.139	.090	.097
	Positive	.115	.090	.094
	Negative	-.139	-.068	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.844	.545	.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.474	.927	.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada variabel pencegahan kecurangan = 0,474, variabel peran internal audit dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,927 dan variabel dewan komisaris nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,875 > 0,05 sehingga data dikatakan berdistribusi normal.

Selain itu uji normalitas data dapat dilihat dari grafik sesuai gambar berikut dimana terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran data bersifat normal.



**Gambar 4.1**  
**Grafik Uji Normalitas P-Plot**

## 2) Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF di atas 10, maka ada indikasi terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

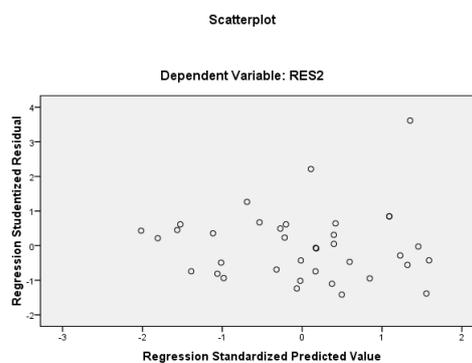
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	Peran Internal Audit	.806	1.240
	Dewan Komisaris	.806	1.240

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas diketahui variabel peran internal audit dengan nilai VIF= 1,240 dan variabel dewan komisaris dengan nilai VIF= 1,240 lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas adalah dengan metode diagram Scatterplot dengan dasar pemikiran bahwa jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa penyebaran residual adalah teratur dan tidak membentuk pola. Hal ini dapat terlihat

dari titik-titik atau plot yang menyebar diantara titik 0 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### b) Persamaan Regresi Berganda

Setelah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS 16. Dari hasil pengolahan data SPSS, dapat dianalisis model estimasi sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Uji Regresi Linier**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.088	5.506		.924	.362
	Peran Internal Audit	.509	.227	.306	2.249	.031
	Dewan Komisaris	.629	.168	.510	3.746	.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 5,088, koefisien regresi peran internal audit ( $\beta_1$ ) = 0,509 dan koefisien regresi dewan komisaris ( $\beta_2$ ) = 0,629 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda :  $Y = 5,088 + 0,509 X_1 + 0,629 X_2$ .

Interpretasi dari persamaan regresi berganda sebagai berikut:

- 1) Nilai 5,088 menunjukkan nilai konstanta ( $\alpha$ ) yang diartikan jika internal audit dan dewan komisaris adalah konstan, maka besarnya pencegahan kecurangan adalah 5,088.
- 2) Nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) variabel peran internal audit sebesar 0,509 yang memberikan arti bahwa pencegahan kecurangan dapat meningkat sebesar 0,509 jika peran internal audit meningkat satu satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi ( $\beta_2$ ) variabel peran dewan komisari sebesar 0,629 yang memberikan arti bahwa pencegahan kecurangan dapat meningkat sebesar 0,629 jika peran dewan komisaris meningkat satu satuan.

### c) Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji t dan uji F yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Uji t

Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui variabel internal audit ( $X_1$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,249$  dimana  $t_{tabel} = 1,68957$ . Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Nilai signifikansi =  $0,031 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa peran internal audit secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selanjutnya pada variabel dewan komisari ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,746$  dimana  $t_{tabel} = 1,68957$ . Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Nilai signifikansi =  $0,001 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

## 2) Uji F

Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.10**  
**Uji F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1128.785	2	564.392	16.436	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1167.532	34	34.339		
	Total	2296.317	36			

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Peran Internal Audit

b. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai  $F_{hitung} = 16,436$ . Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada  $\alpha = 0,05$  dengan derajat pembilang = jumlah variabel yang diteliti  $- 1 = 3 - 1 = 2$  dan derajat penyebut =  $n - k - 1 = 37 - 3 - 1 = 33$  sehingga diperoleh  $F_{tabel} = 3,28$ . Nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $F_{hitung}$ , apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dinyatakan ada pengaruh.

Hasil menunjukkan  $F_{hitung} = 16,436 > F_{tabel} = 3,28$  yang menunjukkan bahwa peran internal audit dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

**d) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.11**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.462	5.8599637

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Peran Internal Audit

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *R Square* = 0,492 atau 49,2% yang menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan dapat dijelaskan pada peran internal audit dan dewan komisaris sebesar 49,2% dan sisanya 51,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada kolom *Standard Error of Estimated* diperoleh hasil sebesar 5,859. Angka ini menunjukkan bahwa kesalahan yang mungkin terjadi dalam memprediksi pencegahan kecurangan pada penelitian ini adalah sebesar 5,859.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil uji statistik antara peran internal audit dengan pencegahan kecurangan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,249 > t_{tabel} = 1,68957$  dan signifikansi  $= 0,031 < \alpha = 0,05$  yang menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden diketahui bahwa peran audit internal tersebut adalah melakukan observasi, penghitungan dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Selain itu peran penting dari audit internal dalam mencegah perbuatan kecurangan mencakup mencegah kecurangan, mendeteksi kecurangan dan melakukan investigasi kecurangan. Hal ini terbukti dari 36 responden yang memberikan pendapatnya mengenai melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi, terdapat 6 orang yang memberikan pendapat ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang dalam hal melakukan observasi untuk memastikan operasi perusahaan sesuai dengan aturan yang dijalankan yang sekaligus menunjukkan bahwa peran internal audit masih lemah di dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kecurangan yang dilakukan beberapa oknum perusahaan. Selanjutnya ditemukan yang berpendapat ragu-ragu dalam hal melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi sebanyak 8 orang, dan 1

orang berpendapat tidak setuju. Kemudian dari hasil temuan juga ditemukan pendapat yang menyatakan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi sebanyak 13 orang. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa peran internal audit perusahaan belum maksimal. Padahal menurut modul internal auditor di Abad 21 (YPIA, 1999) disebutkan bahwa auditor internal memiliki 3 (tiga) peran yaitu auditor internal memperhatikan dan mengingatkan, auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu sebagai *partner* dari manajemen dan auditor internal mengarahkan dan menggerakkan yang lain untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior.

Dengan ditemukannya beberapa kelemahan dari peran internal audit memberikan celah kepada siapa saja untuk melakukan kecurangan. Bologna, Jack dalam Karyono (2013, hal.10) menyatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exposure* (pengungkapan). Dari hasil penelusuran peneliti yang menyebabkan terjadinya kecurangan adalah karena adanya kesempatan dari kelemahan perusahaan tersebut.

Saat ini keberadaan internal audit sudah merupakan suatu bagian penting dari perusahaan. Keberadaannya terus berkembang seiring dengan perkembangannya dunia bisnis yang membutuhkan penanganan profesional. Peran audit internal yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam suatu organisasi tentunya akan sangat membantu manajemen dalam

menghadapi persaingan bisnis. Pada prinsipnya audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti. Salah satu temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan. Kecurangan terjadi antara lain disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut.

Banyak pepatah lama mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Demikian pula dalam pencegahan kecurangan, hal yang mendasar adalah mencegah kecurangan. Banyak cara untuk mencegah kecurangan tersebut diantaranya yang paling sering dilakukan adalah pengawasan rutin di dalam suatu sistem yang dijalankan perusahaan atau organisasi. Peran yang dilakukan audit internal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan. Melalui pendapat Diaz Priantara (2013) diketahui bahwa pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur.

Peran internal auditor dalam aktivitas operasional sehari-hari termasuk keterlibatan dalam proses pelaporan transaksi keuangan dan struktur pengendalian

intern yang memberi kesempatan internal auditor untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Efektivitas internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum semua jajaran direksi mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan, pendeteksian dan investigasi kecurangan pada internal auditor. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas auditnya, internal auditor harus waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya peluang atau kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam kenyataannya, kewaspadaan dan sifat skeptik yang pada tempatnya, mungkin merupakan dua keterampilan yang penting bagi internal auditor. Penyelidikan yang kritis terhadap kemungkinan kecurangan harus diikuti oleh penilaian terhadap pengendalian yang ada, praktik pengendalian dan seluruh lingkup pengendaliannya yang potensial. Untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan/ organisasi, sering kali dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal.

Dari hasil penelitian dan uraian di atas sejalan dengan pendapat Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*) perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, diperlukan peran aktif dari audit internal. Sukrisno Agoes (2012) mengemukakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Melalui pendapat tersebut tercermin adanya peran audit internal di dalam suatu perusahaan. Peran dari audit internal inilah yang dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Melalui pendapat Diaz Priantara tersebut dapat diketahui bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan dari internal audit, maka pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter audit internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah upaya untuk menghindari terjadinya perilaku penyimpangan untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi. Untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan tersebut

dapat dilakukan oleh internal audit. Peran dan tanggung jawab internal audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, berkaitan dengan pengungkapan risiko potensial pada berbagai bentuk kegiatan/operasi organisasi.

## **2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil uji statistik antara peran internal audit dengan pencegahan kecurangan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,746 > t_{tabel} = 1,68957$  signifikansi  $= 0,001 < \alpha = 0,05$  yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden diketahui bahwa yang paling menonjol peran dewan komisaris adalah dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar, menanyakan dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal, dewan komisaris memberikan nasihat kepada tin internal audit. Hal ini terbukti dari 36 responden yang memberikan pendapat dalam hal pengawasan, ternyata 19 orang yang menyatakan ragu-ragu atau kurang setuju bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar, 16 orang yang menyatakan dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal. Karyono (2013) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen, yaitu mencegah kecurangan (*fraud*) dengan menerapkan kendali intern yang andal dimana pengendalian intenal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris atau entitas, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk

menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pencegahan terjadi apabila pengendalian tersebut dapat mendeteksi adanya fraud pada suatu aktivitas tanpa menunggu adanya audit.

Terbongkarnya kecurangan di tempat penelitian ini berawal dari kecurigaan salah satu anggota dewan komisaris dan atas kecurigaan tersebut, anggota dewan komisaris tersebut membawa seorang auditor dari luar yang akhirnya terbongkar melalui pemeriksaan yang dilakukan menyimpulkan adanya kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh audit eksternal diketahui adanya penggelembungan harga (*mark-up*) sehingga dari temuan tersebut dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauhmana kerugian yang dialami perusahaan sehingga dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris memberi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Bila pengawasan dilakukan dengan baik, maka dapat menghindari atau setidak-tidaknya dapat memperkecil kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan (*fraud*) pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Faktor pendorong *fraud* dapat diartikan sebagai pola pemanfaatan kesempatan/peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Terjadinya *fraud* tersebut adalah dengan membuat harga yang tidak sesuai dengan harga pasar (*mark-up*) sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Hal ini disebabkan peran internal auditor di dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Amin Widjaja Tunggal (2016) mengemukakan bahwa kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak pihak lain.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) diketahui bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Fungsi pengawasan dewan komisaris diantaranya adalah dapat membentuk komite sehingga berdasarkan pedoman KNKG, komite audit bertugas membantu dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sementara itu Rindove (1999) yang dikutip oleh Gusnardi (2009) mengemukakan bahwa komite audit harus memainkan peranan penting sebagai sistem pemantauan internal untuk memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan manajemen konsisten dengan kepentingan para pemegang saham.

Dari pendapat di atas dapat diketahui dewan komisaris memiliki peran dalam pencegahan kecurangan. Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi.

Terbongkarnya kecurangan yang dilakukan beberapa pihak manajemen tersebut disebabkan niat yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta adanya kesempatan. Amin Widjaja Tunggal (2016) menyatakan bahwa beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adanya kesempatan. Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa perusahaan ini kurang dalam hal pengawasan. Walaupun perusahaan membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan, namun hal ini belum cukup untuk pencegahan kecurangan. Hal ini dapat ditinjau dari pendapat Amin Widjaja Tunggal (2012) yang menyatakan bahwa beberapa kondisi penyebab *fraud*, adalah: 1) Insentif atau tekanan yaitu manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*, 2) Kesempatan yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*, 3) sikap atau rasionalisasi yaitu ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dapat mencegah terjadinya kecurangan. Dewan komisaris bukan hanya memiliki tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap direksi, akan tetapi dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan untuk hal-hal tertentu untuk memperkecil terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi bukan hanya karena adanya pengawasan yang kurang akan tetapi karena adanya kesempatan sehingga dengan demikian untuk mencegah terjadinya kecurangan diperlukan pengawasan

yang mendalam dan adanya sistem pengendalian efektif sehingga niat untuk melakukan kecurangan dapat dicegah atau tidak adanya kesempatan.

### **3. Pengaruh Peran Internal Audit dan Dewan Komisaris Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil uji statistik antara peran internal audit dan dewan komisaris dengan pencegahan kecurangan diperoleh nilai  $F_{hitung} = 16,551 > F_{tabel} = 3,28$  dan signifikansi  $= 0,000 < \alpha = 0,05$  yang menunjukkan bahwa peran internal audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang tersebut ada. Sistem kerja yang tidak transparan merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan. Kecurangan dengan cara menyasati sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah orang dalam atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan. Oleh karena itu upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian audit internal. Peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan perusahaan sesuai dengan kemajuan jaman.

Selain itu dewan komisaris juga memiliki peran dalam pencegahan kecurangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris, yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Dalam perkembangannya, komite audit bertugas mengawasi tanggung jawab manajemen dalam hal pelaporan keuangan. Peran tersebut mengalami perkembangan saat ini sehingga komite audit juga bertugas untuk mengawasi pengendalian internal dan kegiatan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dapat melakukan pencegahan kecurangan. Namun temuan baru menunjukkan bahwa karena kecurangan dapat terjadi karena perilaku dari seseorang sehingga dengan demikian dewan komisaris juga memiliki peran yang langsung dalam pencegahan kecurangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Namun dari hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dapat mencegah kecurangan secara langsung bilamana hal tersebut diperlukan walaupun pendapat yang menyatakan bahwa komite audit dibentuk dari dewan komisaris dan tugas komite audit diantaranya adalah mencegah terjadinya kecurangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh peran internal dan dewan komisaris terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran internal audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
2. Dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
3. Peran internal audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan peran dan efektivitas audit internal serta dewan komisaris yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
  - a. Audit internal

Peran audit internal dapat ditingkatkan dengan secara rutin melakukan pengawasan di setiap kegiatan atau operasi perusahaan khususnya dalam pembelian bahan-bahan operasi perusahaan sehingga dengan optimalnya peran dan tugas auditor internal dapat mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan, ketidak-efektifan dan

*conflict of interest* serta dalam pengangkatan audit internal harus memenuhi ketentuan sebagai seorang auditor.

b. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab dewan komisaris bukan hanya memberikan nasihat kepada direksi akan tetapi dapat lebih aktif dalam pengawasan operasi perusahaan khususnya bila menerima informasi adanya dugaan kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan dengan merubah metode analisis data serta dapat menambah luas wilayah penelitian terhadap beberapa perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal (2016). *Memahami Konsep Pengendalian Internal*. Jakarta: Harvarindo.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud*. Penerbit Harvarindo.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Intisari Internal Audit*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_ (2008). *Audit Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ardiana Peni Rahmawati dan Idjang Soetikno (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Akuntansi. *Jurnal Universitas Diponegoro*
- Diaz Priantara (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana
- Dwi Shinta Mahesarani (2016). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan*. Semarang : Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ety Meikhati dan Istiyawati Rahayu (2015). Peranan Audit Internal Dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta). *Jurnal Paradigma* Vol. 13, No. 01, Februari–Juli 2015
- Fitrawansyah (2014). *Fraud & Auditing*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Gunawan Widjaja (2008). *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Forum Sahabat.
- Gusnardi (2009). *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Gatot Supramono (2008). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Penerbit Djambatan.
- Iloa P. Halla, (1999). A View of Corporate Governance and Control In Finland. *Managerial Auditing Journal* 14/3
- Hiro Tugiman (2003). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.

- Ikatan Akuntan Indonesia (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Imam Ghozali (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kadek Utami Kusumaningsih & I Gde Ary Wirajaya (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan Di Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.19.3. Juni (2017): 1832-1860.
- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004). *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta.
- Muhammad Ansar (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik Indonesia. Semarang : *Jurnal Repository*, Universitas Diponegoro.
- Mulyadi (2002). *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Moenaf H. Regar (2000). *Dewan Komisaris*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- OECD (2004). *Principles of Corporate Governance*
- Pusdiklatwas BPKP (2008). *Kode Etik dan Standar Auditing*.
- Ridwan Khairandy (2008). *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media.
- Suginam (2016). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). *Pelita Informatika Budi Darma*, Volume : XV, Nomor: 1, Oktober 2016.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukrisno Agoes (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Jilid 1, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto Danang (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Theodorus M. Tuanakotta (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

The Institute Of Internal Auditors (IIA) (2004). *Standards for professional practice of internal Auditing*. Florida.

Valery G. Kumaat (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.

Wilopo (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IX*: Padang. 23-26 Agustus 2006

## KUESIONER

### I. Identitas Responden

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu bersedia mengisi daftar isian berikut dengan cara memberikan jawaban pada salah satu pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No Responden : ..... (tidak perlu diisi)

Nama/Inisial : .....

Jenis Kelamin : Lk / Pr (Coret yang tidak perlu)

Pendidikan : SMA / D3 / S1 (Coret yang tidak perlu)

Berikut ini adalah berbagai pertanyaan mengenai variabel penelitian. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda.

SS : Sangat Setuju                      TS : Tidak Setuju

S : Setuju                                      STS : Sangat Tidak Setuju

RR : Ragu-ragu

### II. Pencegahan Kecurangan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Perusahaan menetapkan kebijakan anti <i>fraud</i>					
2.	Adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti <i>fraud</i>					
3.	Pengendalian intern perusahaan dengan adanya pemisahan fungsi yang menciptakan kondisi saling cek antar fungsi					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
4.	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem					
5.	Perusahaan melakukan pengawasan yang memadai					
6.	Adanya pemeriksaan kembali barang yang keluar masuk di pos satpam					
7.	Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus					
8.	Audit internal melakukan pengawasan yang efektif					
9.	Ada CCTV termasuk di gudang di dalam pabrik					
10.	Melakukan identifikasi kelas-kelas transaksi					
11.	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem					
12.	Perusahaan membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan					

### III. Peran Internal Audit

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
2.	Melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
3.	Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
4.	Auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur					
5.	Staf bagian audit internal boleh dipindahkan untuk sementara waktu oleh departemen fungsional lainnya					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
6.	Semua individu yang tergabung dalam tim auditor internal berlatar belakang pendidikan akuntansi					
7.	Auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang					
8.	Auditor internal telah mempunyai pengalaman di bidangnya					
9.	Auditor internal memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh bagian akuntansi yang terdapat dalam perusahaan					
10.	Auditor internal melaporkan hasil audit internal dan memberi rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelemahan yang ditemukannya					

### III. Dewan Komisaris

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dewan komisaris selalu menanyakan perkembangan keuangan perusahaan					
2.	Dewan komisaris rutin melakukan pengawasan keuangan					
3.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar					
4.	Dewan komisaris membentuk komite audit					
5.	Dewan komisaris mengawasi kinerja tim internal audit					
6.	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang penerimaan tim internal audit					
7.	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang cara mencegah kecurangan kepada tim internal audit					
8.	Dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal					

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
9.	Dewan komisaris menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari tim internal audit					
10.	Dewan komisaris memberikan nasihat kepada tim internal audit					

**KUESIONER**  
**(Sebelum Uji Validitas dan Reliabilitas)**

**I. Identitas Responden**

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu bersedia mengisi daftar isian berikut dengan cara memberikan jawaban pada salah satu pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No Responden : ..... (tidak perlu diisi)

Nama/Inisial : .....

Jenis Kelamin : Lk / Pr (Coret yang tidak perlu)

Pendidikan : SMA / D3 / S1 (Coret yang tidak perlu)

Berikut ini adalah berbagai pertanyaan mengenai variabel penelitian. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda.

SS : Sangat Setuju                      TS : Tidak Setuju

S : Setuju                                      STS : Sangat Tidak Setuju

RR : Ragu-ragu

**II. Pencegahan Kecurangan**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Perusahaan menetapkan kebijakan anti <i>fraud</i>					
2.	Adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti <i>fraud</i>					
3.	Pengendalian intern perusahaan dengan adanya pemisahan fungsi yang menciptakan kondisi saling cek antar fungsi					
4.	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
5.	Perusahaan melakukan pengawasan yang memadai					
6.	Adanya pemeriksaan kembali barang yang keluar masuk di pos satpam					
7.	Melakukan penilaian secara berkala					
8.	Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus					
9.	Audit internal melakukan pengawasan yang efektif					
10.	Ada CCTV termasuk di gudang di dalam pabrik					
11.	Melakukan identifikasi kelas-kelas transaksi					
12.	Adanya prosedur mendeteksi <i>fraud</i> secara otomatis dalam sistem					
13.	Perusahaan membuat standar yang digunakan sebagai acuan audit internal yang dijalankan perusahaan					

### III. Peran Internal Audit

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Melakukan observasi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
2.	Melakukan penghitungan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
3.	Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan organisasi					
4.	Auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur					
5.	Staf bagian audit internal boleh dipindahkan untuk sementara waktu oleh departemen fungsional lainnya					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
6.	Semua individu yang tergabung dalam tim auditor internal berlatar belakang pendidikan akuntansi					
7.	Auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang					
8.	Auditor internal telah mempunyai pengalaman di bidangnya					
9.	Auditor internal memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh bagian akuntansi yang terdapat dalam perusahaan					
10.	Auditor internal melaporkan hasil audit internal dan memberi rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelemahan yang ditemukannya					

### III. Dewan Komisaris

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dewan komisaris selalu menanyakan perkembangan keuangan perusahaan					
2.	Dewan komisaris rutin melakukan pengawasan keuangan					
3.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar					
4.	Dewan komisaris membentuk komite audit					
5.	Dewan komisaris selalu memberikan nasihat kepada tim internal audit					
6.	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang penerimaan tim internal audit					
7.	Dewan komisaris memberikan nasihat tentang cara mencegah kecurangan kepada tim internal audit					
8.	Dewan komisaris memberikan saran tentang syarat-syarat penerimaan audit internal					

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
9.	Dewan komisaris menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari tim internal audit					
10.	Dewan komisaris memberikan nasihat kepada tin internal audit					





Butir11	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	-.038	.368*	.395*	1.000**	1	1.000**	1.000**	.970**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.843	.045	.031	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir12	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	-.038	.368*	.395*	1.000**	1.000**	1	1.000**	.970**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.843	.045	.031	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir13	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	-.038	.368*	.395*	1.000**	1.000**	1.000**	1	.970**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.843	.045	.031	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pencegahan Kecurangan (Y)	Pearson Correlation	.970**	.970**	.970**	.970**	.970**	.970**	.070	.458*	.489**	.970**	.970**	.970**	.970**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.712	.011	.006	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Butir6	Pearson Correlation	.024	.968**	-.162	.178	.041	1	-.159	.031	.968**	-.242	.513**
	Sig. (2-tailed)	.900	.000	.392	.347	.830		.401	.872	.000	.198	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir7	Pearson Correlation	.109	-.164	.906**	.231	.213	-.159	1	.190	-.164	.933**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.567	.387	.000	.219	.259	.401		.314	.387	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir8	Pearson Correlation	.957**	.040	.196	.082	.957**	.031	.190	1	.115	.043	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.834	.300	.668	.000	.872	.314		.545	.822	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir9	Pearson Correlation	.109	.935**	-.105	.156	.053	.968**	-.164	.115	1	-.245	.543**
	Sig. (2-tailed)	.567	.000	.579	.411	.780	.000	.387	.545		.192	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir10	Pearson Correlation	.033	-.245	.904**	.167	.057	-.242	.933**	.043	-.245	1	.459
	Sig. (2-tailed)	.861	.192	.000	.378	.765	.198	.000	.822	.192		.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Internal Audit (X1)	Pearson Correlation	.583**	.518**	.586**	.441*	.602**	.513**	.582**	.617**	.543**	.459	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.001	.015	.000	.004	.001	.000	.002	.011	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Butir5	Pearson Correlation	.456 <sup>*</sup>	.487 <sup>**</sup>	.387 <sup>*</sup>	.387 <sup>*</sup>	1	.342	.281	.229	.287	.403 <sup>*</sup>	.588 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.011	.006	.035	.035		.064	.133	.223	.124	.027	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir6	Pearson Correlation	.698 <sup>**</sup>	.588 <sup>**</sup>	.637 <sup>**</sup>	.606 <sup>**</sup>	.342	1	.398 <sup>*</sup>	.580 <sup>**</sup>	.652 <sup>**</sup>	.291	.787 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.064		.029	.001	.000	.119	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir7	Pearson Correlation	.521 <sup>**</sup>	.391 <sup>*</sup>	.420 <sup>*</sup>	.454 <sup>*</sup>	.281	.398 <sup>*</sup>	1	.297	.528 <sup>**</sup>	.456 <sup>*</sup>	.654 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.003	.032	.021	.012	.133	.029		.111	.003	.011	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir8	Pearson Correlation	.429 <sup>*</sup>	.573 <sup>**</sup>	.375 <sup>*</sup>	.231	.229	.580 <sup>**</sup>	.297	1	.583 <sup>**</sup>	.358	.636 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.041	.219	.223	.001	.111		.001	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir9	Pearson Correlation	.644 <sup>**</sup>	.607 <sup>**</sup>	.590 <sup>**</sup>	.396 <sup>**</sup>	.287	.652 <sup>**</sup>	.528 <sup>**</sup>	.583 <sup>**</sup>	1	.366 <sup>*</sup>	.767 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.030	.124	.000	.003	.001		.047	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Butir10	Pearson Correlation	.651 <sup>**</sup>	.503 <sup>**</sup>	.395 <sup>*</sup>	.319	.403 <sup>*</sup>	.291	.456 <sup>*</sup>	.358	.366 <sup>*</sup>	1	.665 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.031	.086	.027	.119	.011	.052	.047		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dewan Komisaris	Pearson Correlation	.884 <sup>**</sup>	.839 <sup>**</sup>	.734 <sup>**</sup>	.710 <sup>**</sup>	.588 <sup>**</sup>	.787 <sup>**</sup>	.654 <sup>**</sup>	.636 <sup>**</sup>	.767 <sup>**</sup>	.665 <sup>**</sup>	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## HASIL UJI RELIABILITAS

### Reliability

#### Scale: Variabel Pencegahan Kecurangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	14

#### Scale: Variabel Peran Internal Audit

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	11

#### Scale: Dewan Komisaris

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	11

**Lampiran : 3**

**Master Data**

R	Karakteristik			Variabel Pencegahan Kecurangan ( Y )												
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JLH
1	Laki-laki	38	S1	2.372	2.535	1.000	2.151	2.205	3.597	2.357	2.105	2.057	3.416	3.207	2.057	<b>29.060</b>
2	Perempuan	33	S1	2.372	3.751	2.409	2.151	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	4.596	2.239	3.257	<b>37.748</b>
3	Laki-laki	48	SMA	1.000	2.535	1.000	1.000	2.205	2.448	2.357	2.105	3.216	2.308	2.239	2.057	<b>24.472</b>
4	Laki-laki	38	S1	1.000	2.535	2.409	3.288	2.205	3.597	4.664	3.213	4.544	3.416	3.207	3.257	<b>37.333</b>
5	Laki-laki	25	SMA	1.000	2.535	1.000	2.151	3.459	2.448	3.488	2.105	3.216	2.308	2.239	1.000	<b>26.951</b>
6	Perempuan	33	S1	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	4.739	3.488	3.213	3.216	4.596	3.207	3.257	<b>40.995</b>
7	Laki-laki	48	D3	3.717	3.751	1.000	3.288	3.459	2.448	3.488	3.213	1.000	3.416	3.207	3.257	<b>35.244</b>
8	Laki-laki	25	SMA	1.000	3.751	2.409	2.151	1.000	1.000	2.357	1.000	2.057	2.308	2.239	2.057	<b>23.331</b>
9	Laki-laki	25	D3	1.000	2.535	1.000	3.288	3.459	4.739	4.664	3.213	4.544	3.416	4.208	3.257	<b>39.321</b>
10	Perempuan	48	SMA	1.000	2.535	1.000	3.288	3.459	2.448	2.357	1.000	2.057	2.308	2.239	2.057	<b>25.749</b>
11	Laki-laki	48	S1	2.372	2.535	1.000	3.288	4.822	2.448	4.664	4.461	4.544	4.596	4.208	4.638	<b>43.574</b>
12	Laki-laki	54	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	3.597	2.357	3.213	3.216	3.416	2.239	3.257	<b>36.574</b>
13	Laki-laki	48	SMA	1.000	2.535	1.000	1.000	2.205	2.448	2.357	2.105	3.216	2.308	2.239	2.057	<b>24.472</b>
14	Laki-laki	48	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	3.416	3.207	3.257	<b>38.673</b>
15	Laki-laki	38	SMA	2.372	2.535	1.000	2.151	3.459	2.448	1.000	3.213	3.216	2.308	1.000	3.257	<b>27.960</b>
16	Perempuan	42	SMA	1.000	2.535	1.000	2.151	2.205	2.448	2.357	2.105	2.057	2.308	2.239	1.000	<b>23.407</b>
17	Laki-laki	33	S1	1.000	2.535	1.000	2.151	2.205	2.448	3.488	2.105	1.000	2.308	3.207	2.057	<b>25.506</b>
18	Laki-laki	48	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	3.597	2.357	3.213	3.216	3.416	3.207	3.257	<b>37.542</b>
19	Laki-laki	25	SMA	3.717	4.916	2.409	3.288	3.459	2.448	2.357	4.461	3.216	2.308	2.239	2.057	<b>36.875</b>
20	Laki-laki	54	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	2.448	3.488	3.213	3.216	3.416	3.207	3.257	<b>37.525</b>

R	Karakteristik			Variabel Pencegahan Kecurangan ( Y )												
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JLH
21	Laki-laki	25	SMA	2.372	2.535	1.000	3.288	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	4.596	4.208	3.257	<b>38.228</b>
22	Laki-laki	38	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	3.597	3.488	3.213	2.057	3.416	2.239	3.257	<b>36.546</b>
23	Perempuan	21	SMA	2.372	4.916	2.409	4.544	4.822	4.739	4.664	4.461	4.544	4.596	4.208	4.638	<b>50.910</b>
24	Perempuan	33	SMA	1.000	2.535	1.000	2.151	2.205	3.597	2.357	2.105	3.216	3.416	2.239	3.257	<b>29.078</b>
25	Laki-laki	48	SMA	2.372	3.751	2.409	2.151	3.459	3.597	3.488	3.213	2.057	3.416	2.239	3.257	<b>35.409</b>
26	Laki-laki	33	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	3.416	3.207	3.257	<b>38.673</b>
27	Laki-laki	21	SMA	2.372	2.535	1.000	3.288	3.459	3.597	3.488	2.105	3.216	1.000	1.000	3.257	<b>30.317</b>
28	Laki-laki	33	SMA	2.372	3.751	2.409	3.288	3.459	2.448	3.488	3.213	3.216	2.308	3.207	3.257	<b>36.417</b>
29	Laki-laki	42	SMA	2.372	3.751	2.409	4.544	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	3.416	3.207	3.257	<b>39.929</b>
30	Laki-laki	21	SMA	3.717	4.916	3.762	2.151	4.822	4.739	4.664	4.461	2.057	4.596	4.208	3.257	<b>47.349</b>
31	Laki-laki	33	SMA	2.372	3.751	2.409	4.544	3.459	3.597	3.488	3.213	4.544	3.416	2.239	3.257	<b>40.288</b>
32	Laki-laki	42	SMA	1.000	2.535	1.000	2.151	2.205	2.448	2.357	2.105	2.057	4.596	1.000	2.057	<b>25.512</b>
33	Laki-laki	33	D3	3.717	4.916	3.762	4.544	4.822	4.739	4.664	4.461	2.057	3.416	4.208	4.638	<b>49.942</b>
34	Laki-laki	21	SMA	1.000	2.535	1.000	3.288	2.205	2.448	2.357	2.105	3.216	2.308	2.239	2.057	<b>26.759</b>
35	Laki-laki	33	SMA	2.372	3.751	2.409	4.544	3.459	3.597	3.488	3.213	3.216	3.416	4.208	3.257	<b>40.929</b>
36	Laki-laki	33	SMA	3.717	1.000	3.762	3.288	4.822	4.739	4.664	4.461	3.216	4.596	2.239	4.638	<b>45.140</b>
37	Laki-laki	48	S1	2.372	4.916	2.409	4.544	4.822	4.739	4.664	4.461	4.544	4.596	4.208	4.638	<b>50.910</b>

R	Peran Internal Audit (XI)										JLH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2.363	3.643	1.000	1.000	2.380	3.786	1.000	2.291	3.712	1.000	22.176
2	1.000	2.319	1.000	2.480	2.380	2.393	2.253	1.000	1.000	2.312	18.138
3	2.363	3.643	1.000	2.480	2.380	3.786	1.000	2.291	3.712	1.000	23.656
4	3.738	2.319	2.274	2.480	3.772	2.393	2.253	3.622	2.356	2.312	27.519
5	2.363	3.643	2.274	1.000	2.380	3.786	2.253	2.291	3.712	2.312	26.016
6	2.363	2.319	1.000	4.017	2.380	2.393	1.000	2.291	2.356	1.000	21.119
7	3.738	1.000	2.274	2.480	3.772	1.000	2.253	3.622	1.000	2.312	23.452
8	2.363	2.319	2.274	1.000	2.380	2.393	2.253	2.291	2.356	2.312	21.942
9	1.000	2.319	2.274	4.017	1.000	2.393	2.253	1.000	2.356	2.312	20.924
10	2.363	2.319	3.486	2.480	2.380	2.393	2.253	2.291	2.356	2.312	24.634
11	2.363	1.000	3.486	2.480	2.380	1.000	3.465	2.291	1.000	3.595	23.061
12	2.363	2.319	2.274	2.480	2.380	2.393	2.253	2.291	2.356	2.312	23.422
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.312	11.312
14	3.738	2.319	3.486	2.480	3.772	2.393	3.465	3.622	2.356	3.595	31.226
15	1.000	2.319	2.274	2.480	1.000	2.393	2.253	1.000	2.356	2.312	19.387
16	2.363	3.643	1.000	2.480	2.380	3.786	1.000	2.291	3.712	1.000	23.656
17	2.363	1.000	2.274	1.000	2.380	1.000	2.253	2.291	1.000	2.312	17.874
18	2.363	2.319	2.274	1.000	2.380	2.393	2.253	2.291	2.356	2.312	21.942
19	3.738	1.000	2.274	2.480	3.772	1.000	2.253	3.622	1.000	2.312	23.452
20	2.363	2.319	1.000	2.480	2.380	2.393	1.000	2.291	2.356	1.000	19.583
21	2.363	2.319	3.486	2.480	2.380	2.393	3.465	2.291	2.356	3.595	27.129
22	3.738	2.319	3.486	4.017	3.772	2.393	3.465	3.622	2.356	3.595	32.763
23	3.738	3.643	1.000	2.480	3.772	3.786	1.000	3.622	3.712	1.000	27.754
24	2.363	2.319	3.486	2.480	2.380	2.393	3.465	2.291	2.356	3.595	27.129
25	2.363	1.000	2.274	1.000	2.380	1.000	2.253	2.291	1.000	2.312	17.874
26	2.363	3.643	2.274	2.480	2.380	2.393	2.253	3.622	2.356	2.312	26.077
27	2.363	1.000	2.274	1.000	2.380	2.393	2.253	2.291	2.356	2.312	20.623
28	2.363	2.319	1.000	2.480	2.380	2.393	1.000	2.291	2.356	1.000	19.583
29	3.738	2.319	1.000	1.000	3.772	2.393	1.000	3.622	2.356	1.000	22.200
30	2.363	2.319	2.274	2.480	3.772	2.393	3.465	3.622	2.356	2.312	27.356
31	1.000	3.643	2.274	2.480	1.000	3.786	2.253	1.000	3.712	2.312	23.461
32	2.363	1.000	1.000	2.480	2.380	1.000	1.000	2.291	1.000	1.000	15.515
33	3.738	2.319	3.486	2.480	3.772	2.393	3.465	3.622	2.356	3.595	31.226
34	1.000	2.319	1.000	1.000	1.000	2.393	1.000	1.000	2.356	1.000	14.067
35	2.363	3.643	2.274	1.000	2.380	3.786	2.253	2.291	3.712	2.312	26.016
36	3.738	2.319	2.274	2.480	3.772	2.393	3.465	3.622	2.356	3.595	30.014
37	3.738	3.643	1.000	2.480	3.772	3.786	1.000	3.622	3.712	1.000	27.754

**Lampiran : 4**

**Hasil Uji Normalitas**

**NPar Tests**

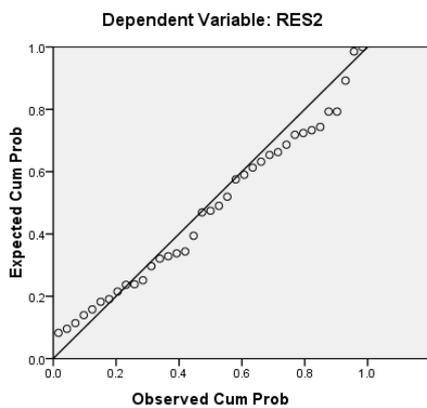
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pencegahan Kecurangan	Peran Internal Audit	Dewan Komisaris
N		37	37	37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	35.531027	23.27114	29.55805
	Std. Deviation	7.9866498	4.801331	6.479123
Most Extreme Differences	Absolute	.139	.090	.097
	Positive	.115	.090	.094
	Negative	-.139	-.068	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.844	.545	.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.474	.927	.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



## Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peran Internal Audit	.806	1.240
	Dewan Komisaris	.806	1.240

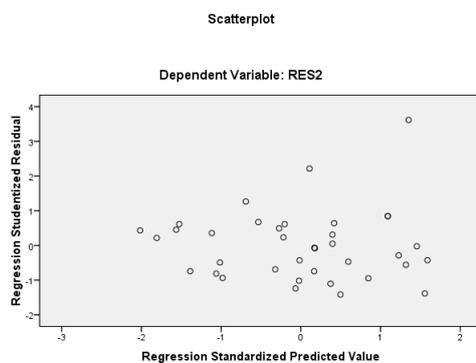
a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimensio n	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Peran Internal Audit	Dewan Komisaris
1	1	2.956	1.000	.00	.00	.00
	2	.024	11.043	.11	.34	.97
	3	.020	12.159	.88	.65	.03

a. Dependent Variable: RES2



**Lampiran : 5**

**Regression**

**Variables Entered/Removed**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dewan Komisaris, Peran Internal Audit <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.462	5.8599637

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Peran Internal Audit

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1128.785	2	564.392	16.436	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1167.532	34	34.339		
	Total	2296.317	36			

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Peran Internal Audit

b. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.088	5.506		.924	.362
	Peran Internal Audit	.509	.227	.306	2.249	.031
	Dewan Komisaris	.629	.168	.510	3.746	.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimensio n	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Peran Internal Audit	Dewan Komisaris
1	1	2.956	1.000	.00	.00	.00
	2	.024	11.043	.11	.34	.97
	3	.020	12.159	.88	.65	.03

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan